

PENGARUH PDRB DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA MELALUI MEDIASI INVESTASI DI PROVINSI BALI

Arif Budiarto.¹
Made Heny Urmila Dewi.²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia. e-mail: muharifbudiarto@gmail.com/ telp: +62 85738168232
²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.

ABSTRAK

Masalah ketenagakerjaan salah satunya dapat dikurangi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tergantung kepada banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung PDRB dan upah minimum provinsi terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Hasil analisis data menunjukkan, bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Upah minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja dan bukan merupakan variabel mediasi pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kata kunci: *PDRB, upah minimum provinsi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja*

ABSTRACT

Employment issues one of which can be reduced by increasing economic growth is one indicator of the success of development. Economic growth in an area depends on many factors, one of which is the government policy itself. This study aimed to analyze the effect of directly or indirectly GDP and provincial minimum wage to investment and employment in the province of Bali. The analysis technique used in this study is the technique of path analysis. Results of the analysis of the data showed that GDP significant positive effect on investment and the employment rate. The minimum wage negative but no significant impact on investment and employment. Investments significant negative effect on employment. Investment is not a mediating variables influence the provincial minimum wage on employment and not the mediating variables influence of GDP on employment.

Keywords: *GDP, the provincial minimum wage, investment, and employment*

PENDAHULUAN

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas, namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda, misalnya masalah produk domestik regional bruto (PDRB), upah dan investasi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada dasawarsa yang lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja (Todaro, 2000). Pasar tenaga kerja, seperti pasar lainnya dalam perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, namun pasar tenaga kerja berbeda dari sebagian besar pasar lainnya karena permintaan tenaga kerja merupakan tenaga kerja turunan (*derived demand*), permintaan akan tenaga kerja sangat tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkannya (Mankiw, 2006).

Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik (BPS Provinsi Bali, 2014). Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau, akibatnya arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindari yang dibentuk untuk pembentukan tenaga kerja yang lebih baik. Dengan situasi seperti ini, berpengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja).

Tabel 1. Pertumbuhan Penduduk yang Bekerja Usia 15 Tahun Keatas Provinsi Bali Tahun 1993-2013

Tahun	Jumlah (Orang)	Pertumbuhan (%)	Tahun	Jumlah (Orang)	Pertumbuhan (%)
1993	1.501.418	-	2004	1.835.165	3,96
1994	1.527.632	1,75	2005	1.895.741	3,30
1995	1.558.686	2,03	2006	1.870.288	-1,34
1996	1.644.827	5,53	2007	1.982.134	5,98
1997	1.683.408	2,35	2008	2.029.730	2,40
1998	1.597.287	-5,12	2009	2.057.118	1,35
1999	1.612.941	0,98	2010	2.177.358	5,85
2000	1.712.954	0,06	2011	2.204.874	1,26
2001	1.714.240	0,08	2012	2.268.708	2,90
2002	1.715.452	0,07	2013	2.273.897	0,23
2003	1.765.317	2,91	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2014

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa secara absolut terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali setiap tahunnya. Namun, jika dilihat dari pertumbuhannya, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali cukup fluktuatif. Tidak ada peningkatan yang cukup tinggi dan beberapa kali mengalami penurunan persentase dalam pertumbuhannya. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sempat mengalami angka negatif pada tahun 1998 pada saat krisis moneter dan tahun 2006 pada saat bom Bali 2 (dua). Menurut hasil Sensus Penduduk pada tahun 1990-2000 penyerapan tenaga kerja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 2,67 persen per tahun, sedangkan tahun 2000 – 2010 hanya mengalami pertumbuhan 1,92 persen per tahun. Angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja Indonesia yakni sebesar 8 persen.

Masalah ketenagakerjaan salah satunya dapat dikurangi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan oleh PDRB diharapkan juga mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja di daerah.

Tabel 2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Bali Tahun 1993-2013

Tahun	PDRB (jutaan Rp)	Pertumbuhan %	Tahun	PDRB (jutaan Rp)	Pertumbuhan %
1993	13.082.082	-	2004	19.963.244	4,62
1994	14.064.526	7,5	2005	21.072.445	5,56
1995	15.179.988	7,93	2006	23.084.300	9,55
1996	16.419.291	8,16	2007	24.449.886	5,92
1997	17.372.850	5,8	2008	25.910.326	5,97
1998	16.670.295	-4,04	2009	27.290.946	5,33
1999	16.781.693	0,67	2010	28.882.494	5,83
2000	17.293.089	3,04	2011	30.757.776	6,49
2001	17.879.875	3,4	2012	32.804.381	6,56
2002	18.423.861	3,04	2013	34.787.627	6,65
2003	19.080.896	3,57	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2014

Pada Tabel 2 terlihat bahwa pertumbuhan PDRB dari tahun 1993 sampai 2002 cukup fluktuatif dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1998 saat krisis moneter yakni sebesar -4,04. Pada tahun 2003 sampai tahun 2013 pertumbuhan PDRB mulai meningkat dengan adanya kegiatan ekonomi yang lebih baik sehingga menghasilkan nilai tambah barang dan jasa dalam kontribusi

terhadap PDRB. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB diharapkan juga mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja di daerah (Boediono, 1999).

Pada upah, hubungannya berbanding terbalik, sehingga apabila upah meningkat akan mengurangi penyerapan tenaga kerja (Wicaksono, 2010). Jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali salah satunya dipengaruhi oleh naiknya upah minimum provinsi. Penetapan kebijakan upah minimum akhir-akhir ini telah menghambat peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern (SMERU, 2001). Sedangkan Klein dan Dompe (2007) berpendapat bahwa upah minimum, membantu menyamakan ketidakseimbangan dalam daya tawar pekerja upah rendah yang dihadapi dalam pasar tenaga kerja. Sementara itu, upah minimum telah memperhitungkan efek yang akan terjadi pada industri besar, tidak ada satupun yang berfokus pada pekerja khususnya pekerja berketerampilan rendah secara lebih luas di seluruh sektor (Sabia, 2008).

Tabel 3. Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 1993-2013

Tahun	UMP (Rp/bln)	Pertumbuhan (%)	Tahun	UMP (Rp/bln)	Pertumbuhan (%)
1993	75.000	-	2004	425.000	24,63
1994	99.000	32,00	2005	447.500	5,29
1995	117.000	18,18	2006	510.000	13,97
1996	127.000	8,55	2007	622.000	21,96
1997	141.500	11,42	2008	682.650	9,75
1998	162.500	14,84	2009	760.000	11,33
1999	176.500	8,62	2010	829.316	9,12
2000	202.300	14,62	2011	890.000	7,32
2001	329.950	62,95	2012	967.500	8,71
2002	363.000	6,04	2013	1.181.000	22,07
2003	421.600	10,09	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2014

Terlihat pada Tabel 3 peningkatan upah minimum setiap tahunnya dikhawatirkan akan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Kenaikan UMP tahun 2013 menjadi persentase yang cukup besar yaitu sebesar 22,07 persen (Rp. 967.500 menjadi Rp. 1.181.000) serta berdasarkan data tambahan kenaikan tahun 2013-2014 mencapai 30,6 persen (Rp. 1.181.000 menjadi Rp. 1.524.872) juga menunjukkan kenaikan yang tinggi. Kebijakan ini menimbulkan banyak usaha kecil yang membayar upah di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan dikhawatirkan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja, sehingga menuju tahun 2015 kenaikan UMP hanya dipatok 5,5 persen dari tahun sebelumnya. UMP Bali diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Badung dan Denpasar. Hal tersebut terjadi karena Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dua wilayah itu lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga dua daerah tersebut memiliki UMK tertinggi di Provinsi Bali. Disisi lain, kedua daerah tersebut juga menjadi daerah yang penawaran tenaga kerjanya tinggi. Menurut Alghofari (2010) ditinjau dari sisi pengusaha, kenaikan upah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga pengusaha mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi.

Setiap daerah otonom memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi dan aset-aset yang dimiliki, terutama potensi sumber daya alam daerah yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam pengembangan ekonomi daerah secara umum. Dalam pengembangan aset sumber daya alam di daerah, diperlukan adanya anggaran atau dana dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam,

agar pengembangannya dapat berjalan sesuai dengan rencana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang optimal. Sehingga peran kesempatan kerja yang terbuka luas bagi para pencari kerja tidak luput dari masalah investasi. Menawarkan cara untuk memanfaatkan modal baru dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat yang melalui siklus positif dari kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Burkett, 2012).

Besar kecilnya investasi yang terjadi di masyarakat akan sangat mempengaruhi besar kecilnya kesempatan kerja yang tercipta dalam masyarakat tersebut. Adanya investasi akan meningkatkan kegiatan produksi sehingga akan membuka kesempatan kerja baru (Sucitrawati, 2012).

Tabel 4. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2013

Tahun	PMTDB (Jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)	Tahun	PMTDB (Jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)
1993	2.649.556	-	2004	2.757.231	7,12
1994	3.008.041	13,53	2005	2.831.923	2,71
1995	3.295.008	9,54	2006	2.894.194	2,20
1996	4.009.895	21,70	2007	4.560.361	57,57
1997	3.609.185	-9,99	2008	5.616.494	23,16
1998	3.131.741	-13,23	2009	6.062.070	7,93
1999	2.435.516	-22,23	2010	7.374.880	21,66
2000	2.454.079	0,76	2011	8.393.310	13,81
2001	2.483.342	1,19	2012	10.082.070	20,12
2002	2.541.211	2,33	2013	11.123.140	10,33
2003	2.573.899	1,29	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan pertumbuhan PMTDB di Provinsi Bali cukup fluktuatif. Pertumbuhan investasi yang negatif paling tinggi terjadi

pada tahun 1999 setelah terjadinya krisis moneter. Namun, kondisi tersebut cepat pulih dengan mulai meningkatnya investasi pada tahun-tahun selanjutnya. Beberapa tahun terakhir pertumbuhan PMTDB di Provinsi Bali sudah menunjukkan kenaikan diatas 10 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali juga didorong oleh tumbuhnya seluruh komponen pembentuk PDRB dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen PMTDB, sehingga dengan meningkatnya investasi riil yang ditunjukkan dengan peningkatan PMTDB diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali meskipun dengan keadaan upah minimum provinsi yang semakin meningkat. Namun pada kenyataannya, peningkatan PMTDB tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja.

Selaras dengan yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di Provinsi Bali adalah tingginya upah minimum provinsi menjadi biaya produksi dari sisi pelaku usaha terutama usaha kecil yang menyebabkan profit usaha menurun, sehingga membayar upah dibawah upah yang seharusnya bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja yang menimbulkan penyerapan tenaga kerja cenderung menurun. Kondisi tersebut juga diikuti peningkatan PDRB dalam 10 tahun terakhir. Dalam kondisi yang seharusnya ketika PDRB meningkat akan meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja, serta upah minimum provinsi yang meningkat akan diikuti dengan penurunan investasi dan penurunan penyerapan tenaga kerja. Namun, yang terjadi di Provinsi Bali, meningkatnya PDRB tidak diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja dan tingginya penetapan upah minimum provinsi dengan investasi yang meningkat menimbulkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Sehingga

perlu dikaji apakah investasi mempunyai peranan sebagai mediasi dalam PDRB dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Provinsi terhadap Investasi di Provinsi Bali?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Investasi di Provinsi Bali?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung PDRB, upah minimum provinsi terhadap investasi, pengaruh langsung PDRB, upah minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja, pengaruh tidak langsung PDRB dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi.

Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi perkembangan penyerapan tenaga kerja selanjutnya dan sebagai suatu pemikiran untuk memperdalam khasanah mengenai hasil penelitian tentang PDRB, upah minimum provinsi, investasi serta penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

Hipotesis dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif, serta Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Investasi di Provinsi Bali.
2. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif, Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif, serta Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.
3. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif, serta Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Investasi di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Berbentuk asosiatif karena tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Hal ini berarti penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Provinsi terhadap Investasi, pengaruh langsung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, serta pengaruh tidak langsung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Investasi di Provinsi Bali selama periode 1993-2013.

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali karena terjadi masalah dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, padahal Bali merupakan daerah

destinasi pariwisata dunia dengan perkembangan yang pesat dan sudah seharusnya masalah ketenagakerjaan dapat diatasi dengan perkembangan pariwisata yang dapat menjadi penunjang sektor lainnya. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk data runtut waktu yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan dan studi kepustakaan dalam pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan masukan yang dibutuhkan.

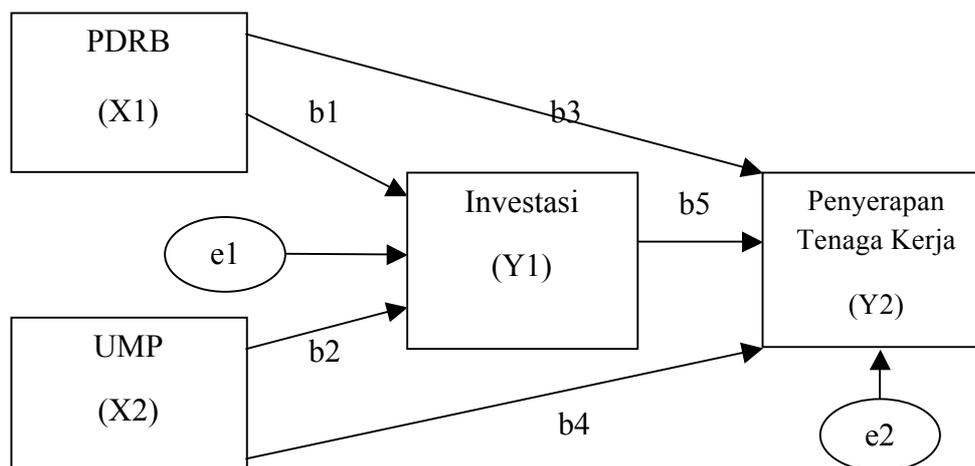
Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja jumlah penduduk diatas usia 15 tahun yang terserap di Provinsi Bali yang mempunyai pekerjaan atau bagian dari angkatan kerja dalam jumlah orang. Sedangkan yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah,

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (X_1), merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu daerah dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan yang dihitung dengan menggunakan tahun dasar dalam satuannya juta rupiah.
- 2) Upah Minimum Provinsi (X_2), upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah minimum dibayarkan kepada pekerja setiap satu bulan sekali yang dinyatakan dalam rupiah.

Variabel intervening dalam penelitian ini yaitu investasi. Investasi merupakan pembentukan modal tetap domestik bruto meliputi berbagai macam

pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru, yang dihasilkan di domestik/regional dan barang modal baru maupun bekas yang berasal dari domestik/regional lain atau diimpor dari luar negeri dalam satuan jutaan rupiah.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan *SPSS versi 13.0 for windows*. Teknik ini digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono, 2013).



Gambar 1. Model Analisis Jalur Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali

Keterangan:

Y_1 = Investasi

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X_2 = Upah Minimum Provinsi (UMP)

Y_2 = Penyerapan Tenaga Kerja

e_1, e_2 = variabel pengganggu

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = koefisien dari masing-masing variabel

Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan yang tidak langsung melalui variabel intervening.

Pengujian variabel mediasi dikenal dengan Uji Sobel. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel PDRB (X_1) terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2) melalui variabel Investasi (Y_1) dan pengaruh tidak langsung variabel Upah Minimum Provinsi (X_2) terhadap variabel Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2) melalui variabel Investasi (Y_1).

Standar *error* koefisien β_1 dan β_5 ditulis dengan $S\beta_1$ dan $S\beta_5$, besarnya standar *error* tidak langsung $S\beta_1\beta_5$ dihitung dengan rumus berikut ini:

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{\beta_5^2 S\beta_1^2 + \beta_1^2 S\beta_5^2}$$

Standar *error* koefisien β_2 dan β_5 ditulis dengan $S\beta_2$ dan $S\beta_5$, besarnya standar *error* tidak langsung $S\beta_2\beta_5$ dihitung dengan rumus berikut ini:

$$S\beta_2\beta_5 = \sqrt{\beta_5^2 S\beta_2^2 + \beta_2^2 S\beta_5^2}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai z dari koefisien $\beta_2\beta_5$ dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_1\beta_5}{S\beta_1\beta_5}$$

$$z = \frac{\beta_2\beta_5}{S\beta_2\beta_5}$$

Keterangan:

$S\beta_1\beta_5, S\beta_2\beta_5$ = besarnya standar *error* tidak langsung
 $S\beta_1$ = standar error koefisien β_1
 $S\beta_2$ = standar error koefisien β_2

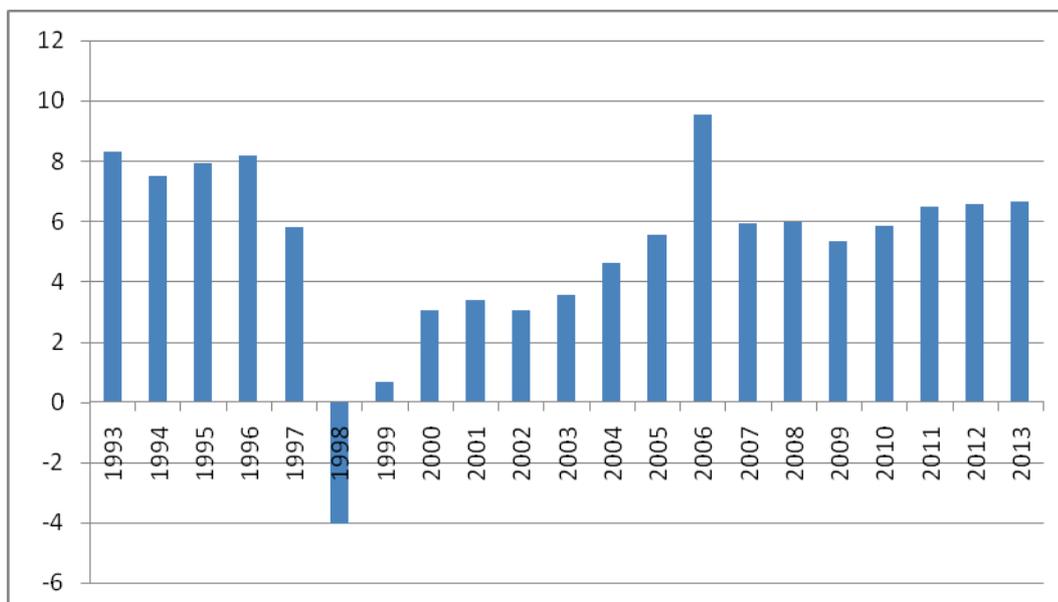
- $S\beta_5$ = standar error koefisien β_5
- β_1 = jalur X_1 terhadap Y_1
- β_2 = jalur X_2 terhadap Y_1
- β_5 = jalur Y_1 terhadap Y_2
- $\beta_1\beta_5$ = jalur X_1 terhadap Y_1 (β_1) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (β_5)
- $\beta_2\beta_5$ = jalur X_2 terhadap Y_1 (β_2) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (β_5)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah di Provinsi Bali

a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh jumlah nominalnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang di dominasi sektor-sektor pariwisata tertinggi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, Provinsi Bali merupakan provinsi yang menjadi primadona para wisatawan baik lokal maupun asing untuk berinvestasi dan berlibur.



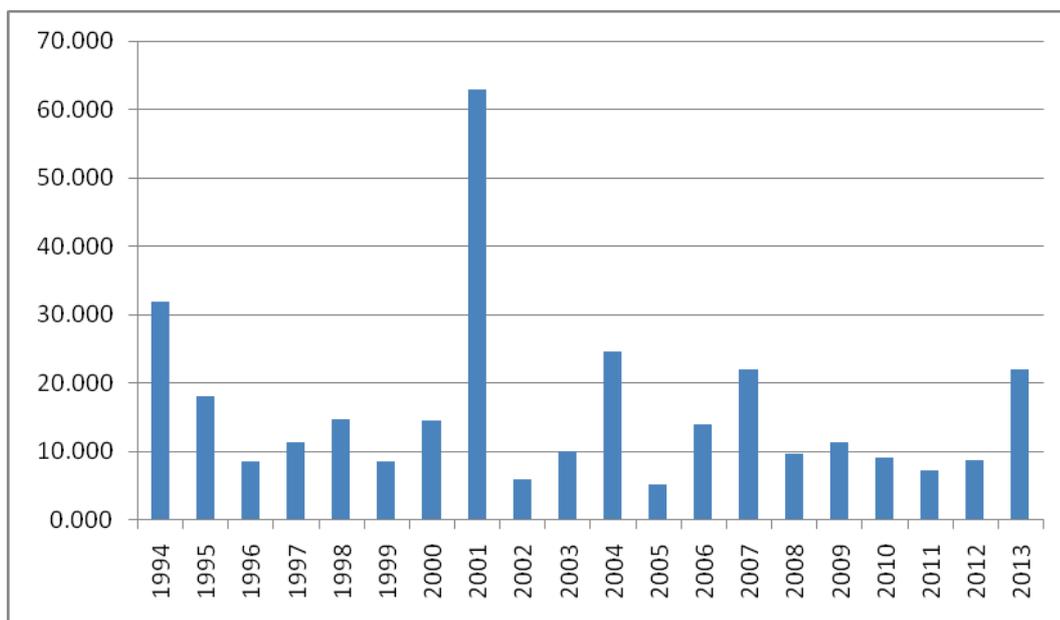
Gambar 2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Bali Tahun 1993-2013 (persen)

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Bali masih dominan di tahun 2006, kontribusinya sebesar 30,79 persen. Sektor pertanian Bali dengan bertumpu pada kekuatan agrobisnis selama tahun 2006 masih mampu memberikan kontribusi sebesar 21,54 persen. Hal tersebut memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih stabil. Berdasarkan Gambar 2, perkembangan PDRB daerah Bali dalam jangka waktu 20 tahun terakhir (1993-2013) berfluktuasi. Terjadinya penurunan PDRB pada tahun 1998 disebabkan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Penurunan PDRB ini sebesar minus 4,04 persen. Krisis ekonomi ini menyebabkan perekonomian di Bali melemah. Dari 9 (sembilan) sektor ekonomi yang ada hanya sektor pertanian dan listrik, gas, dan air minum yang mengalami pertumbuhan positif di tahun 1998 yaitu masing-masing sebesar 0,71 persen dan 13,11 persen. Setelah krisis ekonomi tersebut PDRB di daerah Bali terus mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB terbesar terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 9,55 persen.

b) Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi

Pertumbuhan tingkat upah berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Bali tahun 1993-2013 secara nominal terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 3. Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 1994-2013 (persen)

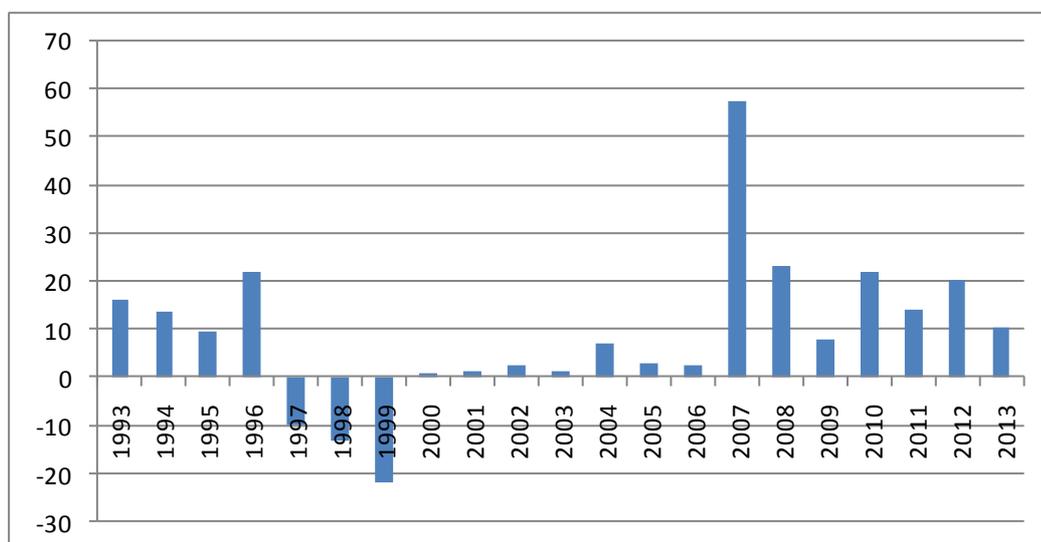
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

Pada Gambar 3, UMP tertinggi terjadi tahun 2013 yaitu sebesar 1.181.000 rupiah, sedangkan UMP yang terendah terjadi pada tahun 1993 yaitu sebesar 75.000 rupiah. Pada tahun 2001 merupakan persentase kenaikan tertinggi yang terjadi di Provinsi Bali yaitu sebesar 63,10 persen dari tahun sebelumnya, sebagai bagian dari perubahan rezim politik dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Ditambah lagi dengan adanya tekanan dari pekerja di daerah dan semakin kuatnya serikat pekerja regional berpengaruh signifikan terhadap kenaikan upah minimum di banyak provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Bali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian mulai pulih dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dan diharapkan masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidup dengan penghasilan yang lebih baik. Namun, pada tahun selanjutnya justru menurun tajam karena jika mengalami peningkatan lagi dikhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Kenaikan upah minimum

provinsi pada tahun 2013-2014 mencapai 30,6 persen (Rp. 1.181.000 menjadi Rp. 1.524.872) juga menunjukkan kenaikan yang tinggi. Hal tersebut seperti menjadi peringatan bagi dunia ketenagakerjaan. Kebijakan ini menimbulkan banyak usaha kecil yang membayar upah di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan dikhawatirkan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja, sehingga menuju tahun 2015 kenaikan UMP hanya dipatok 5,5 persen dari tahun sebelumnya.

c) Pertumbuhan Investasi

Jika dikaitkan dengan kondisi di Bali 20 tahun terakhir, investasi telah dijalankan oleh kalangan swasta maupun dalam negeri khususnya pada sektor perdagangan, hotel, restoran, dan industri, sedangkan investasi oleh pemerintah lebih menekankan pada usaha pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).



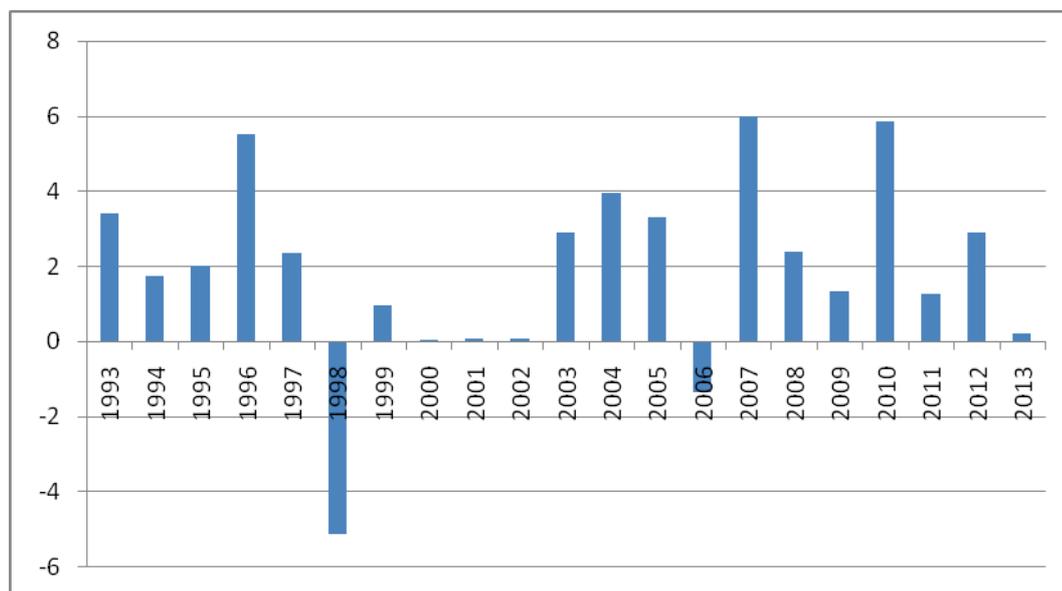
Gambar 4. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993-2013 (persen)

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

Seperti yang terlihat pada Gambar 4 diatas, investasi dari tahun 1993-2013 di Provinsi Bali berfluktuasi. Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 4.560.361 juta rupiah dengan persentase peningkatan sebesar 57,57 persen. Hal tersebut terjadi pasca tragedi bom Bali 2 (dua) yang justru meningkatkan investasi di Provinsi Bali. Sedangkan investasi terendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 2.435.516 juta rupiah dengan kesempatan kerja sebesar 1.612.941 orang. Penurunan perkembangan investasi ini disebabkan oleh krisis moneter yang terjadi di Indonesia dan keamanan yang kurang terjamin, namun justru berdampak positif di sisi kesempatan kerja dengan meningkatnya perkembangan kesempatan kerja dari minus 5,11 persen di tahun 1998 menjadi 0,98 persen. Ini berarti walau investasi mengalami penurunan, apabila investasi ini berorientasi pada padat karya, maka kesempatan kerja di Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang terjadi pada tahun 1998. Apabila investasi berorientasi pada padat modal maka penyerapan tenaga kerja cenderung menurun. Agar penyerapan tenaga kerja tidak menurun maka industri dan perusahaan harus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dengan mengurangi penggunaan mesin.

d) Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja secara umum adalah penduduk yang siap bekerja. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja.



Gambar 5. Pertumbuhan Penduduk yang Bekerja Usia 15 Tahun Keatas Provinsi Bali Tahun 1993-2013 (persen)

Sumber: *BPS Provinsi Bali, 2014*

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali tahun 1993-2013 cukup fluktuatif. Tidak ada peningkatan yang cukup tinggi dan beberapa kali mengalami penurunan persentase dalam pertumbuhannya. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sempat mengalami angka negatif pada tahun 1998 pada saat krisis moneter dan tahun 2006 pada saat bom Bali 2 (dua). Dampak dari krisis moneter tersebut seperti masih dirasakan pada penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali hingga tahun 2002. Terlihat pada Gambar 5 bahwa pada tahun 1998 hingga 2002 tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2007 pasca terjadinya bom Bali 2 (dua) yang membuat penyerapan tenaga kerja pada tahun-tahun selanjutnya menjadi fluktuatif.

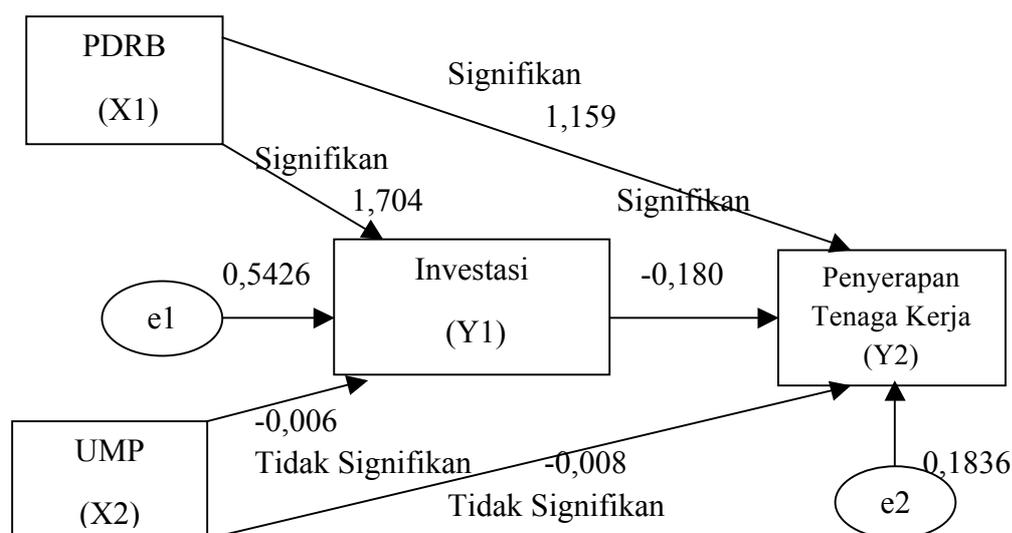
Hubungan Langsung Antar Variabel

Analisis jalur disebut juga analisis linier berganda dengan variabel intervening yang berfungsi untuk menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Suyana Utama, 2012).

Tabel 5. Ringkasan Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	Signifikansi	H ₀
PDRB (X1) terhadap Investasi (Y1)	1,704	0,012	ditolak
PDRB (X1) terhadap Tenaga Kerja (Y2)	1,159	0,000	ditolak
Investasi (Y1) terhadap Tenaga Kerja (Y2)	-0,180	0,039	ditolak
UMP (X2) terhadap Investasi (Y1)	-0,006	0,205	diterima
UMP (X2) terhadap Tenaga Kerja (Y2)	-0,008	0,971	diterima

Tabel 5 merupakan ringkasan hasil regresi yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel ditunjukkan oleh kolom pertama, kolom kedua memaparkan koefisien jalur yang ditunjukkan oleh *Standardized Coefficient* atau nilai *Beta*, sementara itu kolom ketiga menjelaskan nilai sig., dan kolom terakhir mengenai penolakan dan penerimaan hipotesis. Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan hubungan antar variabel sebagai berikut.



Gambar 6. Diagram Jalur Penelitian

Pengaruh PDRB Terhadap Investasi

Hasil analisis memperoleh nilai sig. variabel PDRB sebesar $0,012 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini memiliki arti bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap investasi. Hubungan positif dan signifikan antara variabel PDRB terhadap Investasi yang diperoleh dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Sefle (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Kabupaten Sorong” menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap investasi di Kota Sorong. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan PDRB di Bali mampu meningkatkan investasi, apabila PDRB meningkat, berarti kondisi perekonomian di Bali sedang baik. Hal ini akan membuat para investor datang ke Bali untuk menanamkan modalnya yang menyebabkan investasi di Bali juga meningkat.

Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil analisis memperoleh nilai sig. variabel PDRB sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini memiliki arti bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel PDRB yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada penelitian ini didukung oleh penelitian Ruliansyah (2012) yang berjudul “Analisis Hubungan Antara PDRB, realisasi Investasi, Desentralisasi Fiskal dan Kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur”. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang dapat dicerminkan melalui pertumbuhan PDRB yang semakin meningkat menggambarkan pertumbuhan jumlah proyek, seperti proyek UMKM

dan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Sehingga terdapat pengaruh langsung yang positif antara PDRB dengan penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil analisis memperoleh nilai sig. variabel investasi sebesar $0,039 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini memiliki arti bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel investasi yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada penelitian ini didukung oleh penelitian Adi (2015) yang berjudul “Pola Keterkaitan Antar Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Oleh Sektor UMKM di Indonesia”. Menurut penelitiannya, hubungan yang negatif itu dikarenakan para pemilik usaha dalam menggunakan investasinya lebih cenderung untuk melakukan pembelian barang modal dalam bentuk mesin-mesin (padat modal) sebagai pendukung proses produksi perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan produktivitas dari barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan mesin tersebut berakibat penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Investasi

Hasil analisis memperoleh nilai sig. variabel UMP sebesar $0,205 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa variabel UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi. Variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap investasi dalam penelitian ini didukung oleh Rakhmasari (2006) yang berjudul “Analisis Pengaruh Nilai Upah Minimum Kabupaten Terhadap Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan PDRB

di Kabupaten Bogor”. Menurut penelitiannya, hal ini dikarenakan bahwa ternyata nilai upah minimum tidak menjadi bahan pertimbangan utama bagi para investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bogor. Sehingga naiknya upah minimum setiap tahunnya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil analisis memperoleh nilai sig. variabel UMP sebesar $0,971 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa variabel UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini didukung oleh Sirait (2013) yang berjudul “Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Menurut penelitiannya, kenaikan upah minimum provinsi setiap tahunnya tidak banyak mempengaruhi dalam permintaan tenaga kerja. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Jadi, naiknya upah minimum regional dapat mempengaruhi jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali dan pengaruhnya negatif, berarti dengan meningkatnya upah maka dorongan untuk mencari pekerjaan/bekerja oleh penduduk semakin banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Menurut Bell (1997), yang menyatakan bahwa dampak upah minimum menyebabkan *disemployment effect* di Colombia dan dampak terbesarnya pada pekerja *low skill*.

Pengujian Variabel Mediasi

Pengujian variabel mediasi dikenal dengan uji sobel. Hasil pengujian hubungan tidak langsung antar variabel dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Sobel

Hubungan Variabel	Variabel Mediasi	ab	Sab	z	Keterangan
X1 → Y2	Y1	-0,0121	0,0071	-1,70	bukan mediasi
X2 → Y2	Y1	0,1110	0,0993	1,12	bukan mediasi

Tabel 6 merupakan ringkasan hasil uji sobel yang menjelaskan mengenai hubungan antar variabel. Oleh karena z hitung sebesar $-1,70 < 1,96$, artinya z hitung lebih kecil dari z tabel maka H_0 diterima H_1 ditolak. Artinya Investasi (Y_1) bukan merupakan variabel mediasi dalam PDRB (X_1) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2) di Provinsi Bali atau dengan kata lain PDRB tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Investasi. Oleh karena z hitung sebesar $1,12 < 1,96$, artinya z hitung lebih kecil dari z tabel maka H_0 diterima H_1 ditolak. Artinya Investasi (Y_1) bukan merupakan variabel mediasi dalam Upah Minimum Provinsi (X_2) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2) di Provinsi Bali atau dengan kata lain Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui Investasi. Hasil ini membuktikan bahwa investasi tidak memiliki muatan informasi untuk menjadi mediasi pengaruh PDRB dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja karena investasi dalam penelitian ini menunjukkan investasi padat modal. Sehingga naik turunnya investasi yang berorientasi padat modal tidak mempengaruhi PDRB dan upah minimum provinsi dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, upah minimum provinsi berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Untuk variabel mediasi dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi di Provinsi Bali. Artinya, investasi bukan variabel mediasi antara PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. Upah minimum provinsi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui investasi di Provinsi Bali. Artinya, investasi bukan variabel mediasi antara upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Saran

Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan proyek yang padat karya, seperti kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan tenaga mesin, ataupun seperti industri roti, industri kerajinan tangan yang juga lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan tenaga mesin. Pemerintah harus lebih memperhatikan beberapa faktor seperti, memberikan pelatihan-pelatihan kepada angkatan kerja, contohnya, memberikan keterampilan pada industri kerajinan tangan seperti kerajinan perak dan kerajinan gerabah. Dengan demikian

diharapkan investasi tidak hanya terfokus pada investasi yang padat modal. Pemerintah dalam hal ini agar dapat lebih mengenalkan lagi investor terhadap sektor-sektor lain di Provinsi Bali yang belum disentuh dan mempunyai potensi untuk berkembang bila diinvestasikan, contohnya mengembangkan pemasaran padi organik di Kecamatan Petang sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata ke daerah-daerah yang belum di sentuh oleh investor dan tidak terfokus ke daerah itu-itu saja. Meskipun upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi maupun penyerapan tenaga kerja, pemerintah tetap harus bijaksana dalam menentukan upah minimum pada tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut untuk menjaga agar ketenagakerjaan di Provinsi Bali tetap stabil.

REFERENSI

- Adi, Hikmawan. 2015. Pola Keterkaitan Antar Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Oleh Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. *Jurnal Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Univ. Diponegoro Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Tahun 2014*. (<http://www.bps.go.id/>) diakses tanggal 05 November 2014.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Bell, A. Linda. 1997. The Impact of Minimum Wages in Mexico and Columbia. *Journal Of Labour Economis*. Vol 15, No.3, Part 2; Labor Market Flexibility in Developing Countries, S102-S135.
- Burkett, Ingrid. 2012. Place-Based Impact Investment in Australia. *Literature Review*. The Australian Government Department of Education, Employment and Workplace Relations.

- Klein and Dompe. 2007. Reasons for Supporting the Minimum Wage: Asking Signatories of the "Raise the Minimum Wage" Statement. *Economic in Practice*. Department of Economics, George Mason University. Vol. 04, No. 01, pp. 125-167
- Mankiw, N Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rakhmasari, Arum. 2006. Analisis Pengaruh Nilai Upah Minimum Kabupaten Terhadap Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan PDRB di Kabupaten Bogor. *Skripsi* Fakultas Ekonomi & Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Ruliansyah. 2012. Analisis Hubungan PDRB, Realisasi Investasi, Desentralisasi Fiskal dan Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal* Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Sabia, Joseph. 2008. The Effects of Minimum Wage Increases in New York State: *Evidence From a Natural Experiment*. Department of Public Administration and Policy American University.
- Sefle, Beatriks, Amran Naukoko, George Kawung. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Kabupaten Sorong (Studi Pada Kabupaten Sorong Tahun 2008-2012). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal*. Volume 14 no. 3 - Oktober 2014
- Sirait, Novrin. 2013. Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Vol. 02, No. 02, Hal: 108-118
- Sugiyono. 2013. *Stastitik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Suyana Utama, Made. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif* . Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- SMERU. 2001. Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia. *Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Tim Peneliti SMERU*.
- Sucitrawati, Putu. 2012. Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Todaro, P.Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Wicaksono. 2010. Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-2008. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro